



PEMERINTAH
KABUPATEN
PURWAKARTA



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
JL. GANDANEGARA NO. 25



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Dokumen ini harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD. Sejalan dengan hal tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah menyusun Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama tahun 2022.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai pedoman operasional kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Purwakarta, 15 Juli 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



Dra. Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 19680628 199303 2 007



DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Landasan Hukum -----	3
1.3. Maksud dan Tujuan -----	4
1.4. Sistematika Penulisan -----	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU -----	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Diskominfo -----	 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo -----	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi - Diskominfo -----	 21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD -----	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat-----	 45
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN -----	 62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional -----	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo-----	62
3.3. Program dan Kegiatan -----	70
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----	 78
 BAB V PENUTUP -----	 79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RENJA SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENJA SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RKPDP SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPDP), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

RENJA SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

Kualitas dokumen RENJA sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi



pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan RENJA SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPd dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPd dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RENJA SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan RENJA SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Mengingat RENJA sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Sebagai Rencana Kerja yang mempunyai arti strategis dalam pembangunan daerah, secara umum Renja Diskominfo diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 1 (satu) tahun kedepan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renja Diskominfo merupakan salah satu perangkat dasar untuk ketercapaian pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menindaklanjuti Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam mengevaluasi program/ kegiatan pada tahun 2021, serta perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

Disamping itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :



1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai acuan untuk mengusulkan program/ kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
4. Menyusun rencana kerja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan tahunan lingkup Diskominfo dengan perencanaan pembangunan tahunan kabupaten Purwakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) :

- **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



- **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**
- **Bab V Penutup**



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Diskominfo

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat diidentifikasi 2 (dua) hal yaitu sejauh mana proses perencanaan program/kegiatan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan program/kegiatan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan program pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan acuan bagi Diskominfo selaku OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*Output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi, pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta melaksanakan 5 (Lima) program, 14 kegiatan dan 47 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 semua program mencapai target dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai daerah baru berpacu untuk menunjukkan kinerja yang baik. Capaian Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 mencapai 93,25%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran sebelumnya, hasil tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020, pelaksanaan Kinerja Diskominfo Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja



Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan. Untuk capaian kinerja keuangan Diskominfo tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26,338,772,261	24,562,065,743	93.25%	
	NON PROGRAM	6,614,906,261	6,203,968,132	93.79%	
	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	1,937,332,000	1,746,967,184	90.17%	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54,852,000	25,758,784	46.96%	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang disediakan, 3 jenis
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30,000,000	7,420,000	24.73%	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor yang dibutuhkan, 10 unit pajak kendaraan roda 4
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	62,100,000	62,100,000	100.00%	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibutuhkan, 36 OB
4.	Penyediaan alat tulis kantor	116,800,000	116,795,000	100.00%	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, 55 Jenis ATK
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120,000,000	114,900,000	95.75%	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang disediakan, 10 Jenis Barang Cetakan dan 214400 Lembar Fotocopy
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000	24,965,000	99.86%	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, 17 jenis alat listrik
7.	Penyediaan peralatan rumah tangga	76,820,000	75,670,000	98.50%	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang dibutuhkan, 25 Jenis Peralatan Kebersihan, 48 Tabung Gas 12 Kg, 7 Jenis Belanja Pakai Habis Rumah Tangga



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
8.	Penyediaan makanan dan minuman	35,000,000	24,000,000	68.57%	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat yang dibutuhkan, 420 Dus Jamuan Ringan , 408 Dus Jamuan Makan
9.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25,000,000	22,340,000	89.36%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan, 521 HOK
10.	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	46,800,000	46,650,000	99.68%	Jumlah Jasa PTT yang dibutuhkan, 24 OB dan 2 Orang
11.	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	62,100,000	52,500,000	84.54%	Jumlah Jasa Tenaga Piket Malam yang dibutuhkan, 36 OB
12.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	215,000,000	201,000,000	93.49%	Jumlah Item Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dibutuhkan, 5 Buah Penghancur kertas, 1 Unit Vacum Cleaner, 7 Unit AC, 2 Unit Lemari Es, 6 Unit PC Komputer, 1 Unit Printer Werelles, 1 Unit Layar Proyektor, dan 4 Unit Handphone, 2 kursi besi
13.	Pengadaan mebeleur	10,000,000	10,000,000	100.00%	Jumlah Pengadaan Mebeleur kantor yang dibutuhkan, 1 Set Kursi Sofa tamu, 1 Unit Lemari Buku Kaca
14.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	33,523,024	67.05%	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Kantor yang dipelihara, 10 Unit Roda 4, 1 Unit Roda 2
15.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	233,180,000	198,194,000	85.00%	Jumlah item Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan, 1 Paket Pemeliharaan Peralatan Walldisplay Ogan Lopian dan Pemeliharaan AC (8 Unit x 3 Kegiatan)
16.	Pemeliharaan Gedung Kantor	75,000,000	74,468,000	99.29%	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, 1 Paket



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
17.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,120,000	12,120,000	100.00%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun, 10 buku lakip
18.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20,000,000	19,360,000	96.80%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun, 10 buku
19.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15,000,000	15,000,000	100.00%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun, 1 dokumen
20.	Penyusunan Rencana Kerja	15,000,000	15,000,000	100.00%	Jumlah Dokumen rencana Kerja SKPD yang disusun, 10 buku renja
21.	Pengadaan Pakaian Batik	100,000,000	99,770,000	99.77%	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan, 200 stel
22.	Penyusunan LPPD	6,060,000	6,060,000	100.00%	Jumlah Laporan LPPD yang dibuat, 1 dokumen laporan
23.	Penyusunan Cas Cading/Tapkin	7,500,000	7,500,000	100.00%	Jumlah Dokumen Cas Cading / Tapkin yang disusun, 5 buku
24.	Penguatan penyelenggaraan SPIP	15,000,000	14,995,000	99.97%	Jumlah dokumen SPIP Diskominfo yang disusun, 1 dokumen
25.	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	324,000,000	283,058,376	87.36%	Jumlah Premi Asuransi Pegawai Non PNS yang dibayar, 183 orang 11 bulan
26.	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	8,920,000	89.20%	Tersusunnya 1 dokumen perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah
27.	Belanja Pakaian Khusus hari hari Tertentu	175,000,000	174,900,000	99.94%	Jumlah Pakaian Khusus yang dibutuhkan, 200 stel
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	9,926,884,000	9,020,348,927	90.87%	
28.	Pengadaan Sarana Radio	50,000,000	49,511,000	99.02%	Meningkatnya Kualitas Sarana Peralatan Siaran di LPPL Radio Kabupaten Purwakarta
29.	Peningkatan Kinerja Radio	700,000,000	626,800,000	89.54%	Meningkatnya Kinerja Pegawai dan Organisasi
30.	Peningkatan Kinerja GPTV	1,080,000,000	721,092,000	66.77%	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Pemberitaan Melalui Media Pertelevisian



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
31.	Pengurusan Perijinan Radio	50,000,000	9,127,800	18.26%	Terlaksananya Pengurusan Perijinan Radio
32.	Pengadaan alat penunjang pelayanan informasi	300,000,000	297,195,000	99.07%	Terlaksananya Alat Penunjang Informasi
33.	Media Gathering	50,000,000	48,812,500	97.63%	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan
34.	Liputan Khusus kegiatan kepala daerah	150,000,000	144,900,000	96.60%	Meningkatnya Kualitas Pencapaian Informasi Kepala Daerah
35.	Pelatihan Tim Monitoring Media	-	-	#DIV/0!	
36.	Peningkatan SDM penyiar dan Reporter	50,000,000	46,117,500	92.24%	Meningkatnya Kualitas SDM, Penyiar dan Reporter
37.	Pengadaan Alat Penunjang Dokumen	48,890,000	48,890,000	100.00%	Meningkatnya Alat Penunjang Dokumen
38.	Pengadaan mesin anjungan layanan Informasi KIOS K	75,000,000	72,870,000	97.16%	Tersedianya Kebutuhan Alat Penuunjang Pelayanan Komunikasi
39.	Kegiatan dokumentasi gempungan	52,449,000	52,449,000	100.00%	Meningkatnya Kegiatan Dokumentasi Gempungan
40.	Surevey Indeks Kepuasan Masyarakat	25,000,000	23,300,000	93.20%	Terlaksananya Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
41.	Pengadaan Majalah Pemda Purwakarta	500,000,000	492,182,500	98.44%	Tersedianya Pengadaan Majalah Pemkab Purwakarta
42.	Pengadaan Peralatan Media Center	200,000,000	198,727,500	99.36%	Terlaksananya Komunikasi dan Informasi Publik
43.	Dokumentasi Kegiatan Pemkab. Purwakarta	351,100,000	335,000,000	95.41%	Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemkab Purwakarta Baik Audio maupun Video
44.	Pengadaan Sarana Dokumentasi	98,475,000	97,740,500	99.25%	Meningkatnya Sarana Dokumentasi
45.	Publikasi Pembangunan Daerah	3,800,000,000	3,534,928,727	93.02%	Tercapainya Program Pengembangan komunikasi, Informasi, dan Media Massa Dalam Rangka Publikasi Pembangunan Daerah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
46.	Peningkatan dan pelatihan Kapasitas Jurnalis	100,000,000	94,748,500	94.75%	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Jurnalis
47.	Pengelolaan Ogan Lopian	545,500,000	504,600,000	92.50%	Terlaksananya Pengelolaan Ogan Lopian
48.	Pendayagunaan Media Cetak	150,000,000	126,925,400	84.62%	
49.	Pengadaan sarana Pemberitaan	200,000,000	194,870,000	97.44%	Meningkatkan Kualitas Pemberitaan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Dalam Rangka Pengadaan Sarana Pemberitaan yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
50.	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	300,000,000	276,990,000	92.33%	
51.	Pengembangan Tim Media Sosial	300,000	300,000	100.00%	Jumlah Tim Media Media Sosial
52.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi	325,000,000	324,606,000	99.88%	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Informasi
53.	Pemeliharaan Sarana PPID	50,000,000	47,476,000	94.95%	Terpeliharanya Sarana PPID
54.	Peningkatan Kapasitas PPID	100,000,000	92,257,000	92.26%	Meningkatnya Kapasitas PPID
55.	Penerbitan Kegiatan Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di Media Cetak	100,000,000	97,493,000	97.49%	Dokumen Advokasi Penerbitan hari Jadi Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020 di Media Cetak
56.	Penyiaran dan Penayangan Kegiatan Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di Media elektronik	-	-	#DIV/0!	
57.	Penayangan khusus Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di media online	100,000,000	97,625,000	97.63%	Jumlah Kegiatan Penayangan Khusus Hari Jadi Kab. Purwakarta Tahun 2020 di Media Online
58.	Dokumentasi hari jadi Kabupaten Purwakarta	25,000,000	25,000,000		Meningkatnya Dokumentasi Hari Jadi Kabupaten Purwakarta
59.	Pengadaan e Magazine	100,000,000	94,930,000	94.93%	Meningkatnya Pelayanan Informasi
60.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	#DIV/0!	



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
61.	Peningkatan media informasi pada Kegiatan hari hari Tertentu	150,000,000	144,520,000	96.35%	Peningkatan Informasi Kepada Masyarakat
62.	Pengembangan Sistem Informasi PPID	100,170,000	98,364,000	98.20%	Terlaksananya Pengembangan Sistem PPID
	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	299,510,000	291,910,000	97.46%	
63.	Updating Data Statistik Sektoral	20,460,000	20,460,000	100.00%	Buku Statistik
64.	Peningkatan Kinerja Pengolahan Data	204,050,000	201,150,000	98.58%	Meningkatnya ketersediaan data
65.	Pengembangan Database Statistik	50,000,000	47,100,000	94.20%	System Database Statistik
66.	Penyusunan Data Statistik Sektoral	25,000,000	23,200,000	92.80%	Buku Statistik Sektoral
	Program Pengembangan Persandian Daerah	438,600,000	435,900,000	99.38%	
67.	Peningkatan Kinerja Persandian	213,600,000	213,300,000	99.86%	Terpenuhinya Kebutuhan Akan Peningkatan Kinerja Persandian
68.	Pengadaan Kertas Fax	75,000,000	73,100,000	97.47%	Terpenuhinya Akan Ketersediaan Kertas Fax
69.	Pemeliharaan Sarana Komunikasi	25,000,000	25,000,000	100.00%	Terpenuhinya Kebutuhan Akan Sarana Komunikasi
70.	Pengadaan Alat Komunikasi	50,000,000	49,750,000	99.50%	Meningkatnya Pemenuhan Komunikasi Alat dan Pelayanan Masyarakat
71.	Pengembangan jaringan Rifter	50,000,000	49,750,000	99.50%	Menambah Luas Jangkauan Komunikasi
72.	Pemeliharaan Jaringan Rifter	25,000,000	25,000,000	100.00%	Terpenuhinya Kebutuhan Jangkauan Jaringan Repeater
	Program Pengembangan Teknologi Informatika	5,974,870,000	5,735,203,500	95.99%	
73.	Pengembangan jaringan Komunikasi Informasi dan Data Center	100,000,000	94,000,000	94.00%	Meningkatnya kualitas Pengembangan jaringan Komunikasi Informasi Data Center



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
74.	Sewa Bandwith Internet	2,735,880,000	2,730,490,000	99.80%	Meningkatnya kapasitas Bandwith Internet serta kualitas pengembangan TI di Kab. Purwakarta
75.	Stabilisasi Jaringan	503,200,000	491,209,000	97.62%	Meningkatnya kinerja pelayanan jaringan OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
76.	Pengembangan SDM	-	-	#DIV/0!	
77.	Monev Pengendalian Menara	25,500,000	24,940,000	97.80%	Meningkatnya kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta
78.	Sewa Satelit Fasilitas Layanan Internet Bergerak Diskominfo Purwakarta	227,360,000	178,950,000	78.71%	Pengadaan Sewa Layanan Internet Bergerak Diskominfo
79.	Pengembangan Desa Cerdas Internet	1,244,700,000	1,237,678,500	99.44%	Pengembangan Desa Cerdas Internet di 105 Desa
80.	Pengembangan CCTV Purwakarta	320,110,000	312,455,900	97.61%	Meningkatnya kualitas Peran serta TI d Kab. Purwakarta
81.	Pengembangan Jaringan untuk Area Publik	49,500,000	45,002,000	90.91%	Meningkatnya Jumlah Jaringan Area Publik
82.	Sewa Bandwith Ogan Lopian	630,750,000	582,608,100	92.37%	Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Ogan Lopian
83.	Pemeliharaan Server	100,000,000	-	0.00%	Meningkatnya kualitas Server diskominfo
84.	Pemeliharaan Menara	37,870,000	37,870,000	100.00%	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta
85.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	1,146,670,000	1,127,768,000	98.35%	
86.	Pendayagunaan Aplikasi Pemerintah	267,086,500	260,150,000	97.40%	Gaji THL
87.	Call Centre Kabupaten Purwakarta	200,000,000	199,745,000	99.87%	Perpanjangan sewa call centre 112 Kabupaten Purwakarta
88.	Peningkatan Kapasitas Bidang Aptika	-	-	#DIV/0!	
89.	Pemberdayaan Operator TIK	37,125,000	36,875,000	99.33%	Pelatihan Operator TIK



No	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Output
1	2	3	4	5	6
90.	Sewa Webhosting www.purwakartakab.go.id	100,000,000	99,700,000	99.70%	sewa Hosting www.purwakartakab.go.id
91.	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	525,188,500	523,978,000	99.77%	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi berbasis web (5 Aplikasi), Hibah Aplikasi Kepada Pemerintah Pusat (Aplikasi Pelayanan Kejaksaan Terintegrasi), hibah barang kepada Pemerintah Pusat
92.	Evaluasi Smart City Purwakarta	3,750,000	3,500,000	93.33%	Rapat evaluasi smart city
93.	Monitoring Aplikasi Pemerintah	13,520,000	3,820,000	28.25%	Monitoring dan Evaluasi aplikasi Simkeudes yang ada di Kabupaten Purwakarta (183 Desa)
Jumlah Total		26,338,772,261	24,562,065,743	93.25%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta bisa dikatakan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang masih mampu diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Diskominfo terhadap para pegawai yang ada di Diskominfo Kabupaten Purwakarta.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	2020		TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		
		2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan	Persen	95,00	0,00	-	-	-	-
Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	90,00	0,00	-	-	-	-
Persentase Layanan Informasi Publik	Persen	90,00	0,00	-	-	-	-
Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah	Persen	95,00	0,00	-	-	-	-
Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika	Kegiatan	8,00	0,00	-	-	-	-
Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi	Kegiatan	8,00	0,00	-	-	-	-
Persentase Media Informasi yang Dimanfaatkan	Persen	0,00	100,00	88,00	-	-	-
Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	0,00	100,00	93,10	-	-	-



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	2020		TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		
		2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	0,00	100,00	81,10	-	-	-
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	0,00	100,00	93,20	-	-	-
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Infomatika	Persen	0,00	100,00	90,00	-	-	-
Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	0,00	100,00	70,00	-	-	-
Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	0,00	100,00	70,00	-	-	-
Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	0,00	100,00	90,00	-	-	-
Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	0,00	100,00	99,70	-	-	-
Persentase Aplikasi SPBE yang Sudah Terintegrasi	Persen	0,00	100,00	0,00	-	-	-
Persentase Aplikasi SPBE yang Dimanfaatkan masyarakat umum	Persen	0,00	100,00	99,70	-	-	-



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	2020		TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		
		2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Media Informasi yang dimanfaatkan	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah yang didokumentasikan	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	2020		TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		
		2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Aplikasi SPBE yang sudah terintegrasi	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Aplikasi SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik yang disusun	Dokumen	5,00	0,00	-	-	-	-
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	100,00	100,00	97,70	-	-	-
Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisis Statistik Sektoral dan Spasial yang dihasilkan	Dokumen	100,00	100,00	96,00	-	-	-
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisis Statistik Sektoral dan Spasial yang dihasilkan	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko keamanan informasi (D)	Persen	100,00	100,00	99,86	-	-	-
Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	100,00	100,00	99,86	-	-	-



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	2020		TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		
		2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infromasi (PP)	Persen	100,00	100,00	99,50	-	-	-
Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	Persen	-	-	-	100,00	100,00	100,00



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatas, Diskominfo mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
4. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas
5. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
6. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;



7. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
8. Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
9. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
10. Melaksanakan pengusulan/ penunjukkan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
11. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
12. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
13. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
14. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
15. Mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
16. Menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan;
18. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
20. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Keamanan jaringan teknologi Informasi;
21. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Keamanan jaringan teknologi Informasi;
22. Melaksanakan layanan dan pemeliharaan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
23. Menangani permasalahan keamanan teknologi jaringan informasi;
24. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan pengembangan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
25. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah kabupaten Purwakarta;



26. Melaksanakan tindak lanjut laporan Hasil monitoring dan evaluasi keamanan jaringan teknologi informasi;
27. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
28. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
29. Melaksanakan koordinasi keamanan jaringan teknologi informasi dengan instansi terkait;
30. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi dan Audit Teknologi Informatika;
31. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan audit teknologi informatika;
32. Melaksanakan pelayanan informasi standarisasi teknologi informatika bagi perangkat daerah dan publik;
33. Melaksanakan koordinasi penerapan standar nasional Indonesia lingkup teknologi informatika;
34. Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, audit, registrasi produk dan jasa teknologi informatika;
35. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan pengelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;
36. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan operator;
37. Melaksanakan pengelolaan data penggunaan spectrum frekuensi radio;
38. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan teknologi informatika;
39. Melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terhadap pelanggaran ijin jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/ gedung, telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekuensi radio;
40. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio;



41. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum di daerah;
42. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika;
43. Melaksanakan program kerja Seksi dan Audit Teknologi Informatika;
44. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, analisis pengembangan infrastruktur teknologi informatika;
45. Melaksanakan pembangunan infrastruktur informatika di pemerintah kabupaten purwakarta;
46. Melaksanakan fasilitasi layanan intranet dan internet sehat untuk opd serta masyarakat;
47. Melaksanakan standar operasional prosedur teknologi informatika berkaitan dengan pengelolaan ruangan server, manajemen server dan perangkat infrastruktur informatika lainnya;
48. Melaksanakan pemeliharaan infrasturktur informatika;
49. Melaksanakan pengendalian infrastruktur informatika berkaitan dengan jaringan selular dan infratraktur informatika lainnya berdasarkan standarisasi yang berlaku;
50. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainya berkaitan dengan infrastruktur informatika;
51. Menyusun rencana dan program kerja seksi Aplikasi Informatika;
52. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis aplikasi informatika;
53. Membangun sistem informasi pemerintah untuk pelayanan masyarakat;
54. Mengembangkan aplikasi pemerintah yang sudah dibuat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi;
55. Mengevaluasi infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi berdasarkan standarisasi yang ada dari unsur keusangan dan kerentanan celah kerusakan;
56. Melaksanakan kebijakan telematika dan infromatika di Bidang *e-government*, *e-business*, perangkat lunak dan konten;



57. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan evaluasi aplikasi telematika;
58. Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastruktur aplikasi tatalaksana *e-government*, aplikasi layananan public dan pemerintahan;
59. Melaksanakan kerjasama program *e-government* antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
60. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi pemerintah daerah;
61. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi aplikasi dalam rangka optimalisasi dan keteraturan Aplikasi pemerintah;
62. Menyiapkan rumusan integrasi aplikasi dari infrastruktur sistem informasi pemerintah yang ada berdasarkan standarisasi yang berlaku;
63. Melaksanakan pengintegrasian beberapa aplikasi pemerintah sebagai bahan intelegen bisnis bagi masyarakat dan juga pengguna lainnya;
64. Mengevaluasi integrasi aplikasi;
65. Memberikan bimbingan dan informasi berkaitan dengan integrasi aplikasi pemerintah;
66. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisa dan evaluasi system informatika daerah;
67. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang analisa dan evaluasi system informasi daerah;
68. Melaksanakan verifikasi informasi berkiatan dengan konten berita dalam sistem informasi pemerintah;
69. Mengelola sistem informasi resmi pemerintah daerah;
70. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah;
71. Menganalisa efektivitas penggunaan sistem informasi dan menyiapkan rumusan sisem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkat daerah;



72. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dokumentasi;
73. Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
74. Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
75. Menyusun system dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media;
76. Melaksanakan penyajian serta data dan informasi hasil kegiatan pemerintah daerah;
77. Melaksanakan pengelolaan dan informasi kegiatan pimpinan daerah;
78. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan pemberitaan;
79. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas kegiatan peliputan dan pemberitaan;
80. Menghimpun bentuk kegiatan/acara pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah yang akan diliput;
81. Melaksanakan peliputan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
82. Menyiapkan peliputan bahan pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
83. Melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
84. Melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan pemerintahan daerah;
85. Menyiapkan bahan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik;
86. Melaksanakan publikasi kegiatan pemerintahan daerah;
87. Melaksanakan komunikasi kebijakan daerah kepada masyarakat;
88. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
89. Menghimpun dan mengolah data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;



90. Menyusun bahan press release dan counter release berdasarkan data data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
91. Menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, pimpina/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran kehumasan;
92. Melaksanakan koordinasi dengan kalangan pers dan media massa dalam rangka pemberitaan mengenai kebijakan daerah dan kegiatan pemerintah daerah;
93. Melaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan;
94. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
95. Melaksanakan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
96. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi;
97. Melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi;
98. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait;
99. Melaksanakan fasilitasi, pengelolaan dan pelayanan informasi selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
100. Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis system informasi pengaduan masyarakat;
101. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis system informasi pengaduan masyarakat;
102. Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebaran informasi public;
103. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berkaitan dengan pelayanan informasi;
104. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
105. Menyusun rencana dan proram kerja Seksi Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



106. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Seksi Persandian;
107. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
108. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
109. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirimm dari pusat atau kabupaten/Kota;
110. Menyusun dan menyimpan data peronil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
111. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil sandi;
112. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta megembangkan system dan alat-alat sandi;
113. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
114. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
115. Memberikan saran dan pertimbangan teknis ursan Persandian kepada Atasan;
116. Melaksanakan koordinasi denan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
117. Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
118. Menyusun rencana dan program kerja seksi Statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
119. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan data dan statistis daerah;
120. Menghimpun dan mengelola data dan statistic daerah;
121. Menginventarisir data dan statistic;
122. Menyusun bahan program dan kegiatan di seksi statistic;
123. Melaksanakan pemberian pelayanan data dan statistic dan persandian;



124. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan data dan statistik kepada atasan.

Analisis Lingkungan merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Analisis lingkungan terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Pemahaman terhadap lingkungan internal maupun eksternal akan memberikan pemahaman terhadap organisasi mengenai kondisi dan kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kondisi-kondisi internal maupun eksternal organisasi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan keadaan.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan (scanning) lingkungan internal Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang memperlihatkan unsur - unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

➤ **Kekuatan (Strenght)**

- 1) Adanya regulasi yang mengatur tentang implementasi e-Government.
- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam penerapan e-Government.
- 3) Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

➤ **Kelemahan (Weakness)**

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi IT.
- 2) Belum optimalnya sistem aplikasi layanan antar OPD.



- 3) Kinerja pelayanan publik Diskominfo masih belum memuaskan para pengguna jasa publik.
- 4) Daya dukung sarana dan prasarana TIK yang belum memadai.
- 5) Terbatasnya eksistensi kelompok informasi masyarakat.
- 6) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Diskominfo

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan eksternal organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

➤ **Peluang (Opportunities)**

- 1) Era Globalisasi menuntut pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TIK) untuk meningkatkan daya saing daerah.
- 2) Adanya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana salah satunya Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik.
- 3) Banyaknya lembaga maupun institusi pemerintah yang bergerak dan menggunakan TIK.
- 4) Semakin banyaknya masyarakat yang melek IT serta aktivitas ekonomi global dengan pemanfaatan teknologi informasi.

➤ **Ancaman (Threats)**

- 1) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi publik yang cepat, akurat dan mudah diakses.
- 2) Perkembangan bidang Komunikasi dan Informatika ke depan yang pesat dan kompleks membutuhkan suatu regulasi yang dapat memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Masih adanya Ego Sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terutama dalam berbagi data dan informasi sehingga belum optimalnya integrasi data dan informasi.
- 4) Penerapan e-Government menuntut pengelolaan website Pemerintah Daerah secara terintegrasi.
- 5) Kurangnya pemahaman yang sama mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi



- 6) Adaptasi kebiasaan baru menuntut optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Strategis Diskominfo, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJP sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.



Tabel T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,522,478,129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,522,478,129
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40,000,000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	10,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	10,000,000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	20,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,771,688,084	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,771,688,084
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	6,751,688,084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	6,751,688,084
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	20,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,000,000
6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200,000,000
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan	50 Orang	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan	50 Orang	200,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,250,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,250,000,000
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 jenis	200,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta Nagri Kidul	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 jenis	200,000,000
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah item pengadaan gedung kantor yang dibutuhkan Jumlah item pengadaan peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	9 Jenis 10 Jenis	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta Nagri Kidul	Jumlah item pengadaan gedung kantor yang dibutuhkan Jumlah item pengadaan peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	9 Jenis 10 Jenis	200,000,000
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	134 Jenis	200,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta Nagri Kidul	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	134 Jenis	200,000,000
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Cendera mata ciri khas Diskominfo yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan	55 Jenis 100 Buah 1400 Dus	300,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta Nagri Kidul	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Cenderamata ciri khas Diskominfo yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan	55 Jenis 100 Buah 1400 Dus	300,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	10 Jenis	200,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	10 Jenis	200,000,000
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang dibutuhkan	600 HOK	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang dibutuhkan	600 HOK	150,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267,518,045	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267,518,045
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kendaraan yang dibutuhkan	100 Persen	267,518,045	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kendaraan yang dibutuhkan	100 Persen	267,518,045
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				648,272,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				648,272,000
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Materai yang tersedia	833 Lembar	2,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Materai yang tersedia	833 Lembar	2,500,000
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah jasa komunikasi, jasa air dan listrik kantor yang disediakan	3 Jenis	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah jasa komunikasi, jasa air dan listrik kantor yang disediakan	3 Jenis	150,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	kantor yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar Jumlah jasa PTT yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	36 Bulan 243 Orang	495,772,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	kantor yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar Jumlah jasa PTT yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	36 Bulan 243 Orang	495,772,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335,000,000
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	35,000,000
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	10 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	10 Unit	100,000,000
20.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20 Buah	200,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20 Buah	200,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				6,302,965,350	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				6,302,965,350
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6,302,965,350	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6,302,965,350
21.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah pengembangan informasi pembangunan daerah	3 Kegiatan	962,928,352	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah pengembangan informasi pembangunan daerah	3 Kegiatan	962,928,352
22.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Agenda Prioritas	1 Paket	125,747,562	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Agenda Prioritas	1 Paket	125,747,562
23.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kegiatan dokumentasi hari jadi Purwakarta dan Publikasi Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja GPTV, Dokumentasi Pemkab Purwakarta, Peningkatan Kinerja Radio, Dokumentasi Gempungan	2 Paket 4 Kegiatan	2,157,654,418	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kegiatan dokumentasi hari jadi Purwakarta dan Publikasi Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja GPTV, Dokumentasi Pemkab Purwakarta, Peningkatan Kinerja Radio, Dokumentasi Gempungan	2 Paket 4 Kegiatan	2,157,654,418



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Tersedianya Pengadaan Majalah Pemkab Purwakarta	5000 Eksemplar	1,258,940,573	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Tersedianya Pengadaan Majalah Pemkab Purwakarta	5000 Eksemplar	1,258,940,573
25.	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas PPID	50 Paket	691,244,398	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas PPID	50 Paket	691,244,398
26.	Layanan Hubungan Media	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah liputan khusus kepala daerah	1 Paket	536,342,986	Layanan Hubungan Media	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah liputan khusus kepala daerah	1 Paket	536,342,986
27.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM	1 Paket	24,999,671	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM	1 Paket	24,999,671
28.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kegiatan kinerja pelayanan informasi	1 Kegiatan	435,359,828	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kegiatan kinerja pelayanan informasi	1 Kegiatan	435,359,828
29.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya Penyelenggaraan Kemitraan	100 Persen	109,747,562	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya Penyelenggaraan Kemitraan	100 Persen	109,747,562



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				11,441,870,480	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				11,441,870,480
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6,372,497,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6,372,497,000
30.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwokarta, Purwokarta, Nagri Kidul	Terlaksananya sewa webhosting purwokartakab.g o.id dan domain desa.id	100 Persen	172,500,000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwokarta, Purwokarta, Nagri Kidul	Terlaksananya sewa webhosting purwokartakab.g o.id dan domain desa.id	100 Persen	172,500,000
31.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Purwokarta, Purwokarta, Nagri Kidul	Meningkatnya kualitas jaringan internet dan intranet di Pemda Purwokarta	100 Persen	6,199,997,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Purwokarta, Purwokarta, Nagri Kidul	Meningkatnya kualitas jaringan internet dan intranet di Pemda Purwokarta	100 Persen	6,199,997,000
	Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5,069,373,480	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5,069,373,480



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya kegiatan pendayagunaan aplikasi pemerintah serta tersedianya data monitoring aplikasi pemerintah	100 Persen	488,750,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya kegiatan pendayagunaan aplikasi pemerintah serta tersedianya data monitoring aplikasi pemerintah	100 Persen	488,750,000
33.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk SPBE	100 Persen	75,000,000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk SPBE	100 Persen	75,000,000
34.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah data server yang dikelola	1 Server	899,892,953	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah data server yang dikelola	1 Server	899,892,953
35.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Meningkatnya kualitas jaringan pengawasan jaringan TI untuk desa cerdas internet di Kab Purwakarta	100 Persen	49,998,264	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Meningkatnya kualitas jaringan pengawasan jaringan TI untuk desa cerdas internet di Kab Purwakarta	100 Persen	49,998,264



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah aplikasi pemerintah yang dilakukan tes penetrasi	3 Aplikasi	258,750,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah aplikasi pemerintah yang dilakukan tes penetrasi	3 Aplikasi	258,750,000
37.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah aplikasi berbasis web bagi OPD	8 Aplikasi	431,250,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah aplikasi berbasis web bagi OPD	8 Aplikasi	431,250,000
38.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Sistem Penghubung Layanan	1 Paket	471,500,000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Sistem Penghubung Layanan	1 Paket	471,500,000
39.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kajian quick wins smart city Kab. Purwakarta Jumlah Keikutsertaan Festival/Pameran Smart City Kab. Purwakarta Jumlah Peningkatan Kapasitas Operator TIK	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	391,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah kajian quick wins smart city Kab. Purwakarta Jumlah Keikutsertaan Festival/Pameran Smart City Kab. Purwakarta Jumlah Peningkatan Kapasitas Operator TIK	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	391,000,000
40.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Meningkatnya kualitas Sumber Daya bidang Teknologi Informatika	100 Persen	2,003,232,263	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Meningkatnya kualitas Sumber Daya bidang Teknologi Informatika	100 Persen	2,003,232,263



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				473,524,495	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				473,524,495
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				473,524,495	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				473,524,495
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				473,524,495	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				473,524,495
41.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Statistik	1 Dokumen	88,723,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Statistik	1 Dokumen	88,723,000
42.	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistis yang Terintegrasi	1 Tahun	347,585,400	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistis yang Terintegrasi	1 Tahun	347,585,400
43.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Dokumen Updating Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	54,438,795	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Dokumen Updating Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	54,438,795



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terselenggaranya Sosialisasi Data Statistik Sektoral	1 Kali	78,285,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Terselenggaranya Sosialisasi Data Statistik Sektoral	1 Kali	78,285,000
45.	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Sistem Pengembangan Database Statistik	1 System	78,285,000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Jumlah Sistem Pengembangan Database Statistik	1 System	78,285,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				472,913,762	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				472,913,762
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				472,913,762	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				472,913,762
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				365,319,863	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				365,319,863
46.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Operasional kegiatan persandian	100 Persen	365,319,863	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Operasional kegiatan persandian	100 Persen	365,319,863



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				107,593,899	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				107,593,899	
47.	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Pengadaan Kertas Fax	12 Kegiatan 250 Roll	107,593,899	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kidul	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Kertas Fax	12 Kegiatan 250 Roll	107,593,899	
JUMLAH					28,213,752,216	JUMLAH					28,213,752,216



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2022 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan agar program/ kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terfokus dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021. Adapun program dan kegiatan tahun 2020 serta usulan program dan kegiatan berdasarkan urusan dalam Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2022.



**RINCIAN OUTPUT SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		26,338,772,261	
	2.10.2.10.01.01.00	NON PROGRAM	6,614,906,261	
	2.10.2.10.01.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	1,937,332,000	
1.	2.10.2.10.01.01.07.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54,852,000	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang disediakan, 3 jenis
2.	2.10.2.10.01.01.07.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30,000,000	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor yang dibutuhkan, 10 unit pajak kendaraan roda 4
3.	2.10.2.10.01.01.07.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	62,100,000	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibutuhkan, 36 OB
4.	2.10.2.10.01.01.07.10	Penyediaan alat tulis kantor	116,800,000	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, 55 Jenis ATK
5.	2.10.2.10.01.01.07.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120,000,000	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantoryang disediakan, 10 Jenis Barang Cetakan dan 214400 Lembar Fotocopy
6.	2.10.2.10.01.01.07.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, 17 jenis alat listrik



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
7.	2.10.2.10.01.01.07.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	76,820,000	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang dibutuhkan, 25 Jenis Peralatan Kebersihan, 48 Tabung Gas 12 Kg, 7 Jenis Belanja Pakai Habis Rumah Tangga
8.	2.10.2.10.01.01.07.17	Penyediaan makanan dan minuman	35,000,000	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat yang dibutuhkan, 420 Dus Jamuan Ringan , 408 Dus Jamuan Makan
9.	2.10.2.10.01.01.07.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25,000,000	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan, 521 HOK
10.	2.10.2.10.01.01.07.20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	46,800,000	Jumlah Jasa PTT yang dibutuhkan, 24 OB dan 2 Orang
11.	2.10.2.10.01.01.07.21	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	62,100,000	Jumlah Jasa Tenaga Piket Malam yang dibutuhkan, 36 OB
12.	2.10.2.10.01.01.07.30	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	215,000,000	Jumlah Item Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dibutuhkan, 5 Buah Penghancur kertas, 1 Unit Vacum Cleaner, 7 Unit AC, 2 Unit Lemari Es, 6 Unit PC Komputer, 1 Unit Printer Werelles, 1 Unit Layar Proyektor, dan 4 Unit Handphone, 2 kursi besi
13.	2.10.2.10.01.01.07.33	Pengadaan mebeleur	10,000,000	Jumlah Pengadaan Mebeleur kantor yang dibutuhkan, 1 Set Kursi Sofa tamu, 1 Unit Lemari Buku Kaca
14.	2.10.2.10.01.01.07.39	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Kantor yang dipelihara, 10 Unit Roda 4, 1 Unit Roda 2



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
15.	2.10.2.10.01.01.07.43	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	233,180,000	Jumlah item Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan, 1 Paket Pemeliharaan Peralatan Walldisplay Ogan Lopian dan Pemeliharaan AC (8 Unit x 3 Kegiatan)
16.	2.10.2.10.01.01.07.51	Pemeliharaan Gedung Kantor	75,000,000	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, 1 Paket
17.	2.10.2.10.01.01.07.64	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,120,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun, 10 buku lakip
18.	2.10.2.10.01.01.07.67	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun, 10 buku
19.	2.10.2.10.01.01.07.68	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15,000,000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun, 1 dokumen
20.	2.10.2.10.01.01.07.69	Penusunan Rencana Kerja	15,000,000	Jumlah Dokumen rencana Kerja SKPD yang disusun, 10 buku renja
21.	2.10.2.10.01.01.07.75	Pengadaan Pakaian Batik	100,000,000	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan, 200 stel
22.	2.10.2.10.01.01.07.78	Penyusunan LPPD	6,060,000	Jumlah Laporan LPPD yang dibuat, 1 dokumen laporan
23.	2.10.2.10.01.01.07.79	Penyusunan Cas Cading/Tapkin	7,500,000	Jumlah Dokumen Cas Cading/Tapkin yang disusun, 5 buku
24.	2.10.2.10.01.01.07.80	Penguatan penyelenggaraan SPIP	15,000,000	Jumlah dokumen SPIP Diskominfo yang disusun, 1 dokumen
25.	2.10.2.10.01.01.07.83	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	324,000,000	Jumlah Premi Asuransi Pegawai Non PNS yang dibayar, 183 orang 11 bulan
26.	2.10.2.10.01.01.07.85	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	Tersusunnya 1 dokumen perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
27.	2.10.2.10.01.01.07.86	Belanja Pakaian Khusus hari hari Tertentu	175,000,000	Jumlah Pakaian Khusus yang dibutuhkan, 200 stel
28.	2.10.2.10.01.01.25	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	9,926,884,000	
29.	2.10.2.10.01.01.25.100	Pengadaan Sarana Radio	50,000,000	Meningkatnya Kualitas Sarana Peralatan Siaran di LPPL Radio Kabupaten Purwakarta
30.	2.10.2.10.01.01.25.104	Peningkatan Kinerja Radio	700,000,000	Meningkatnya Kinerja Pegawai dan Organisasi
31.	2.10.2.10.01.01.25.105	Peningkatan Kinerja GPTV	1,080,000,000	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Pemberitaan Melalui Media Pertelevisian
32.	2.10.2.10.01.01.25.106	Pengurusan Perijinan Radio	50,000,000	Terlaksananya Penguusan Perijinan Radio
33.	2.10.2.10.01.01.25.108	Pengadaan alat penunjang pelayanan informasi	300,000,000	Terlaksananya Alat Penunjang Informasi
34.	2.10.2.10.01.01.25.110	Media Gathering	50,000,000	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan
35.	2.10.2.10.01.01.25.111	Liputan Khusus kegiatan kepala daerah	150,000,000	Meningkatnya Kualitas Pencapaian Informasi Kepala Daerah
36.	2.10.2.10.01.01.25.113	Pelatihan Tim Monitoring Media	-	
37.	2.10.2.10.01.01.25.115	Peningkatan SDM penyiar dan Reporter	50,000,000	Meningkatnya Kualitas SDM, Penyiar dan Reporter
38.	2.10.2.10.01.01.25.121	Pengadaan Alat Penunjang Dokumen	48,890,000	Meningkatnya Alat Penunjang Dokumen
39.	2.10.2.10.01.01.25.125	Pengadaan mesin anjungan layanan Informasi KIOS K	75,000,000	Tersedianya Kebutuhan Alat Penuunjang Pelayanan Komunikasi
40.	2.10.2.10.01.01.25.127	Kegiatan dokumentasi gempungan	52,449,000	Meningkatnya Kegiatan Dokumentasi Gempungan
41.	2.10.2.10.01.01.25.128	Surevey Indeks Kepuasan Masyarakat	25,000,000	Terlaksananya Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
42.	2.10.2.10.01.01.25.129	Pengadaan Majalah Pemda Purwakarta	500,000,000	Tersedianya Pengadaan Majalah Pemkab Purwakarta
43.	2.10.2.10.01.01.25.133	Pengadaan Peralatan Media Center	200,000,000	Terlaksananya Komunikasi dan Informasi Publik
44.	2.10.2.10.01.01.25.70	Dokumentasi Kegiatan Pemkab. Purwakarta	351,100,000	Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemkab Purwakarta Baik Audio maupun Video
45.	2.10.2.10.01.01.25.72	Pengadaan Sarana Dokumentasi	98,475,000	Meningkatnya Sarana Dokumentasi
46.	2.10.2.10.01.01.25.74	Publikasi Pembangunan Daerah	3,800,000,000	Tercapainya Program Pengembangan komunikasi, Informasi, dan Media Massa Dalam Rangka Publikasi Pembangunan Daerah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
47.	2.10.2.10.01.01.25.75	Peningkatan dan pelatihan Kapasitas Jurnalis	100,000,000	Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Jurnalis
48.	2.10.2.10.01.01.25.76	Pengelolaan Ogan Lopian	545,500,000	Terlaksananya Pengelolaan Ogan Lopian
49.	2.10.2.10.01.01.25.78	Pendayagunaan Media Cetak	150,000,000	
50.	2.10.2.10.01.01.25.80	Pengadaan sarana Pemberitaan	200,000,000	Meningkatkan Kualitas Pemberitaan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Dalam Rangka Pengadaan Sarana Pemberitaan yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
51.	2.10.2.10.01.01.25.81	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	300,000,000	
52.	2.10.2.10.01.01.25.84	Pengembangan Tim Media Sosial	300,000	Jumlah Tim Media Media Sosial
53.	2.10.2.10.01.01.25.85	Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi	325,000,000	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Informasi



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
54.	2.10.2.10.01.01.25.86	Pemeliharaan Sarana PPID	50,000,000	Terpeliharanya Sarana PPID
55.	2.10.2.10.01.01.25.87	Peningkatan Kapasitas PPID	100,000,000	Meningkatnya Kapasitas PPID
56.	2.10.2.10.01.01.25.88	Penerbitan Kegiatan Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di Media Cetak	100,000,000	Dokumen Advokasi Penerbitan hari Jadi Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2020 di Media Cetak
57.	2.10.2.10.01.01.25.89	Penyiaran dan Penayangan Kegiatan Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di Media elektronik	-	
58.	2.10.2.10.01.01.25.90	Penayangan khusus Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di media online	100,000,000	Jumlah Kegiatan Penayangan Khusus Hari Jadi Kab. Purwakarta Tahun 2020 di Media Online
59.	2.10.2.10.01.01.25.91	Dokumentasi hari jadi Kabupaten Purwakarta	25,000,000	Meningkatnya Dokumentasi Hari Jadi Kabupaten Purwakarta
60.	2.10.2.10.01.01.25.93	Pengadaan e Magazine	100,000,000	Meningkatnya Pelayanan Informasi
61.	2.10.2.10.01.01.25.94	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	
62.	2.10.2.10.01.01.25.95	Peningkatan media informasi pada Kegiatan hari hari Tertentu	150,000,000	Peningkatan Informasi Kepada Masyarakat
63.	2.10.2.10.01.01.25.96	Pengembangan Sistem Informasi PPID	100,170,000	Terlaksananya Pengembangan Sistem PPID
64.	2.10.2.10.01.01.26	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	299,510,000	
65.	2.10.2.10.01.01.26.06	Updating Data Statistik Sektoral	20,460,000	Buku Statistik
66.	2.10.2.10.01.01.26.07	Peningkatan Kinerja Pengolahan Data	204,050,000	Meningkatnya ketersediaan data
67.	2.10.2.10.01.01.26.08	Pengembangan Database Statistik	50,000,000	System Database Statistik
68.	2.10.2.10.01.01.26.09	Penyusunan Data Statistik Sektoral	25,000,000	Buku Statistik Sektoral



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
69.	2.10.2.10.01.01.27	Program Pengembangan Persandian Daerah	438,600,000	
70.	2.10.2.10.01.01.27.09	Peningkatan Kinerja Persandian	213,600,000	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Persandian Akan Kinerja
71.	2.10.2.10.01.01.27.10	Pengadaan Kertas Fax	75,000,000	Terpenuhinya Ketersediaan Kertas Fax Akan Kertas
72.	2.10.2.10.01.01.27.11	Pemeliharaan Sarana Komunikasi	25,000,000	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Komunikasi Akan Sarana Komunikasi
73.	2.10.2.10.01.01.27.12	Pengadaan Alat Komunikasi	50,000,000	Meningkatnya Pemenuhan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Alat dan
74.	2.10.2.10.01.01.27.13	Pengembangan jaringan Rifiter	50,000,000	Menambah Luas Jangkauan Komunikasi
75.	2.10.2.10.01.01.27.14	Pemeliharaan Jaringan Rifiter	25,000,000	Terpenuhinya Kebutuhan Jangkauan Jaringan Repeater
76.	2.10.2.10.01.01.28	Program Pengembangan Teknologi Informatika	5,974,870,000	
77.	2.10.2.10.01.01.28.30	Pengembangan jaringan Komunikasi Informasi dan Data Center	100,000,000	Meningkatnya kualitas Pengembangan jaringan Komunikasi Informasi Data Center
78.	2.10.2.10.01.01.28.31	Sewa Bandwith Internet	2,735,880,000	Meningkatnya kapasitas Bandwith Internet serta kualitas pengembangan TI di Kab. Purwakarta
79.	2.10.2.10.01.01.28.33	Stabilisasi Jaringan	503,200,000	Meningkatnya kinerja pelayanan jaringan OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
80.	2.10.2.10.01.01.28.34	Pengembangan SDM	-	
81.	2.10.2.10.01.01.28.35	Monev Pengendalian Menara	25,500,000	Meningkatnya kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/ Program/Kegiatan	Anggaran	Output
82.	2.10.2.10.01.01.28.37	Sewa Satelit Fasilitas Layanan Internet Bergerak Diskominfo Purwakarta	227,360,000	Pengadaan Sewa Layanan Internet Bergerak Diskominfo
83.	2.10.2.10.01.01.28.38	Pengembangan Desa Cerdas Internet	1,244,700,000	Pengembangan Desa Cerdas Internet di 105 Desa
84.	2.10.2.10.01.01.28.40	Pengembangan CCTV Purwakarta	320,110,000	Meningkatnya kualitas Peran serta TI d Kab. Purwakarta
85.	2.10.2.10.01.01.28.41	Pengembangan Jaringan untuk Area Publik	49,500,000	Meningkatnya Jumlah Jaringan Area Publik
86.	2.10.2.10.01.01.28.42	Sewa Bandwith Ogan Lopian	630,750,000	Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Ogan Lopian
87.	2.10.2.10.01.01.28.45	Pemeliharaan Server	100,000,000	Meningkatnya kualitas Server diskominfo
88.	2.10.2.10.01.01.28.46	Pemeliharaan Menara	37,870,000	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta
89.	2.10.2.10.01.01.29	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	1,146,670,000	
90.	2.10.2.10.01.01.29.15	Pendayagunaan Aplikasi Pemerintah	267,086,500	Gaji THL
91.	2.10.2.10.01.01.29.16	Call Centre Kabupaten Purwakarta	200,000,000	Perpanjangan sewa call centre 112 Kabupaten Purwakarta
92.	2.10.2.10.01.01.29.17	Peningkatan Kapasitas Bidang Aptika	-	
93.	2.10.2.10.01.01.29.19	Pemberdayaan Operator TIK	37,125,000	Pelatihan Operator TIK
94.	2.10.2.10.01.01.29.20	Sewa Webhosting www.purwakartakab.go.id	100,000,000	sewa Hosting www.purwakartakab.go.id
95.	2.10.2.10.01.01.29.21	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	525,188,500	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi berbasis web (5 Aplikasi), Hibah Aplikasi Kepada Pemerintah Pusat (Aplikasi Pelayanan Kejaksaan Terintegrasi), hibah barang kepada Pemerintah Pusat



No	Kode Rekening	Urusan/OPD/Program/Kegiatan	Anggaran	Output
96.	2.10.2.10.01.01.29.24	Evaluasi Smart City Purwakarta	3,750,000	Rapat evaluasi smart city
97.	2.10.2.10.01.01.29.26	Monitoring Aplikasi Pemerintah	13,520,000	Monitoring dan Evaluasi aplikasi Simkeudes yang ada di Kabupaten Purwakarta (183 Desa)
Jumlah Total			26,338,772,261	



**RINCIAN OUTPUT SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,522,478,129
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	10,000,000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	10,000,000
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	20,000,000
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,771,688,084
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	6,751,688,084
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	20,000,000
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10,000,000
2	16	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	10,000,000
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200,000,000
2	16	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta bimbingan	9 Orang	200,000,000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,250,000,000
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 Jenis	200,000,000



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item pengadaan gedung kantor yang dibutuhkan	9 Jenis	200,000,000
						Jumlah item pengadaan peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	10 Jenis	
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	134 Jenis	200,000,000
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	55 Jenis	300,000,000
						Jumlah cenramata ciri khas Diskominfo yang tersedia	100 Buah	
						Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan	1400 dus	
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	10 Jenis	200,000,000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang dibutuhkan	600 HOK	150,000,000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			267,518,045
2	16	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dibutuhkan	100%	267,518,045
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			648,272,000
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	833 lembar	2,500,000
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, jasa air dan listrik kantor yang disediakan	3 Jenis	150,000,000



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	36 Bulan	495,772,000
						Jumlah jasa PTT yang dibutuhkan, pike t malam yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	243 Orang	
2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335,000,000
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	35,000,000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	10 Buah	100,000,000
2	16	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20 buah	200,000,000
2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				6,302,965,350
2	16	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6,302,965,350
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengembangan informasi pembangunan daerah	8 item	962,928,352



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			125,747,562
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan dokumentasi hari jadi purwakarta	1 kegiatan	2,157,654,418
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya tenaga profesional untuk mengelola konten e magazine	11 Orang	1,258,940,573
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas PPID	50 Paket	691,244,398
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	jumlah liputan khusus kepala daerah	1 Paket	536,342,986
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM	1 Paket	24,999,671
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah kegiatan kinerja pelayanan informasi	1 kegiatan	435,359,828
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			109,747,562
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			11,441,870,480
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6,372,497,000
2	16	3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sewa webhosting purwakartakab.g o.id dan domain desa.id	100 Persen	172,500,000
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas jaringan internet dan intranet di Pemda Purwakarta	100 Persen	6,199,997,000



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Meningkatnya kualitas jaringan pengawasan jaringan TI untuk desa cerdas internet di Kab Purwakarta	100 Persen	49,998,264
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah aplikasi pemerintah yang dilakukan tes penetrasi	3 aplikasi	258,750,000
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi berbasis web bagi OPD	6 aplikasi	431,250,000
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan	1 Paket	471,500,000
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5,069,373,480
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendayagunaan aplikasi pemerintah serta tersedianya data monitoring aplikasi pemerintah	100 Persentase	488,750,000
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	sinkronisasi pengelolaan rencana induk SPBE	100 Persentase	75,000,000
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah data server yang dikelola	1 server	899,892,953
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kajian quick wins smart city Kab. Purwakarta	1 Kegiatan	391,000,000
						Jumlah Keikutsertaan Festival/Pameran Smart City Kab. Purwakarta	1 Kegiatan	



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Operator TIK	1 Kegiatan	2,003,232,263
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			473,524,495
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			473,524,495
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Statistik	1 Dokumen	88,723,000
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistis yang Terintegrasi	1 Tahun	173,792,700
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dokumen Updating Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	54,438,795
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Sosialisasi Data Statistik Sektoral	1 kali	78,285,000
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Pengembangan Database Statistik	1 System	78,285,000
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			472,913,762
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasional kegiatan persandian	100%	365,319,863



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Luar Provinsi	3 Hari	107,593,899
						Tersedianya Pengadaan Kertas Fax	250 Roll	
Jumlah								28,213,752,216



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Diskominfo

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah, Untuk Perangkat Daerah Visi dan Misi berpedoman kepada Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Pemilihan Umum Kepala Daerah



Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 maka untuk Visi Misinya adalah Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang ada di Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut : "**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**".

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut, maka dirumuskanlah Misi Kabupaten Purwakarta. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistik yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Misi Kabupaten Purwakarta adalah diwujudkan sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pertama Kesejahteraan Sosial.

Pengertian dari misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi



dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya. Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan pembangunan manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan diatas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya cipta, serta sehat jasmani dan rohani. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, serta menciptakan



suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

**Misi
Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.**

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan perumahan pemukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengolahan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan.

Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala.

Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi disamping meningkatkan



daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta dan masyarakat luas. Selain itu sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor industri, pertanian, kehutanan, pertambangan, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha dan pembangunan daerah.

Misi : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.

Keempat

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan rakyat berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan



suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlibat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengacu pada Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional”**. Adapun tujuan dan sasaran Strategi RPJM yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari table berikut ini :

Misi 2	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
Tujuan 1	:	Mewujudkan Manajemen Perkantoran Secara Optimal



Sasaran		Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
Strategi		Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran
Arah Kebijakan		Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran yang ideal
Program		Dukungan Manajemen Perkantoran
Indikator Program		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah tangga sarana dan prasarana kantor - Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik - Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan administrasi Perkantoran - Persentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - Persentase ketersediaan data kinerja OPD
Tujuan 2	:	Meningkatkan pengelolaan sistem komunikasi informasi publik yang efektif
Sasaran		Meningkatnya pengelolaan system komunikasi informasi public yang efektif
Tujuan 3	:	Meningkatkan kualitas pelayanan public
Sasaran		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Strategis		Meningkatkan sarana system komunikasi yang baik
Arah Kebijakan		Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi yang baik dan merata
Program		Pengembangan informasi dan Komunikasi Publik
Indikator Program		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase media informasi yang dimanfaatkan - Persentase Publikasi program pembangunan daerah - Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang didokumentasikan - Persentase layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani - Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan informasi dan komunikasi publik
Tujuan 4	:	Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta



Sasaran		Terpenuhinya layanan infrastruktur untuk Kabupaten Purwakarta
Tujuan 5	:	Meningkatkan sistem keamanan komunikasi dan informatika
Sasaran		Meningkatnya keamanan system komunikasi dan informatika layanan public
Strategis		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan kota cerdas
Arah Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan penggunaan aplikasi system pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan public - Meningkatkan pelayanan informasi pembangunan yang akurat, cepat dan mudah diakses
Program		Pengembangan Teknologi Informatika
Indikator Program		<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika - Persentase ketersediaan dokumen master plan dan infrastruktur smart city - Tingkat standarisasi infrastruktur informatika di instansi pemerintah dan ruang publik - Tingkat kamanan jaringan teknologi informatika
Tujuan 6	:	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aplikasi Informasi
Sasaran		Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas informatika
Tujuan 7	:	Meningkatkan kapasitas integrasi aplikasi pemerintah
Sasaran		Meningkatnya kapasitas integrasi aplikasi pemerintah
Strategis		Meningkatkan sarana system komunikasi yang baik
Arah Kebijakan		Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi yang baik dan merata
Program		Pengembangan Aplikasi Informatika
Indikator Program		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase layanan aplikasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dikembangkan - Persentase aplikasi SPBE yang sudah terintegrasi - Persentase aplikasi SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum



Tujuan 8	:	Meningkatkan akurasi data statistik sektoral dan keamanan sandi daerah
Sasaran		Meningkatnya akurasi data statistik sektoral dan keamanan sandi daerah
Strategis		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyediaan pelayanan data/informasi sektoral - Meningkatkan pengembangan kemanan persandian daerah
Arah Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan pelayanan data/informasi statistik sektoral daerah - Mengembangkan pengelolaan kemanan persandian daerah
Program		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik - Pengembangan Persandian Daerah
Indikator Program		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan data/informasi statistik sektoral - Persentase dokumen hasil pengelolaan dan analisa statistik sektoral dan spasial yang dihasilkan - Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko kemanan informasi - Tingkat kesiapan penerapan standar persentase keamanan informasi - Tingkat kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden kemanan informasi -

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Diskominfo berdasarkan urusan yang diusulkan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik



3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian

**RINCIAN OUTPUT SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,522,478,129
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	10,000,000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	10,000,000
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	20,000,000
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,771,688,084
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	6,751,688,084
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	20,000,000
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10,000,000
2	16	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1 Dokumen	10,000,000
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200,000,000
2	16	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta bimbingan	9 Orang	200,000,000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,250,000,000
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 Jenis	200,000,000



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item pengadaan gedung kantor yang dibutuhkan	9 Jenis	200,000,000
						Jumlah item pengadaan peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	10 Jenis	
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	134 Jenis	200,000,000
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	55 Jenis	300,000,000
						Jumlah ATK khusus Diskominfo yang tersedia	100 Buah	
						Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan	1400 dus	
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	10 Jenis	200,000,000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang dibutuhkan	600 HOK	150,000,000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			267,518,045
2	16	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dibutuhkan	100%	267,518,045
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			648,272,000
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	833 lembar	2,500,000
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, jasa air dan listrik kantor yang disediakan	3 Jenis	150,000,000



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan , premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	36 Bulan	495,772,000
						Jumlah jasa PTT yang dibutuhkan,piket malam yang dibutuhkan, premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	243 Orang	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335,000,000
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	35,000,000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	10 Buah	100,000,000
2	16	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20 buah	200,000,000
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			6,302,965,350
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6,302,965,350
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengembangan informasi pembangunan daerah	8 item	962,928,352



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
						Output Kegiatan	Target	
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			125,747,562
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan dokumentasi hari jadi purwakarta	1 kegiatan	2,157,654,418
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya tenaga profesional untuk mengelola konten e magazine	11 Orang	1,258,940,573
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas PPID	50 Paket	691,244,398
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	jumlah liputan khusus kepala daerah	1 Paket	536,342,986
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM	1 Paket	24,999,671
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah kegiatan kinerja pelayanan informasi	1 kegiatan	435,359,828
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			109,747,562
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			11,441,870,480
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6,372,497,000
2	16	3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sewa webhosting purwakartakab.go.id dan domain desa.id	100 Persen	172,500,000
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas jaringan internet dan intranet di Pemda Purwakarta	100 Persen	6,199,997,000



Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)
					Output Kegiatan	Target	
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Lingkup	5,069,373,480
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan pendayagunaan aplikasi pemerintah serta tersedianya data monitoring aplikasi pemerintah	100 Persentase 488,750,000
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	sinkronisasi pengelolaan rencana induk SPBE	100 Persentase 75,000,000
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah data server yang dikelola	1 server 899,892,953
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Meningkatnya kualitas jaringan pengawasan jaringan TI untuk desa cerdas internet di Kab Purwakarta	100 Persen 49,998,264
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah aplikasi pemerintah yang dilakukan tes penetrasi	3 aplikasi 258,750,000
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi berbasis web bagi OPD	6 aplikasi 431,250,000
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan	1 Paket 471,500,000
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kajian quick wins smart city Kab. Purwakarta	1 Kegiatan 391,000,000



Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)	
						Output Kegiatan	Target		
						Jumlah Keikutsertaan Festival/Pameran Smart City Kab. Purwakarta	1 Kegiatan		
						Jumlah Peningkatan Kapasitas Operator TIK	1 Kegiatan		
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas SDM bidang Teknologi Informatika	100 Persen	2,003,232,263	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				473,524,495
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				473,524,495
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Statistik	1 Dokumen	88,723,000	
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistis yang Terintegrasi	1 Tahun	173,792,700	
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dokumen Updating Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	54,438,795	
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Sosialisasi Data Statistik Sektoral	1 kali	78,285,000	
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Pengembangan Database Statistik	1 System	78,285,000	



Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Plafon Anggaran 2022 (Rp.)	
					Output Kegiatan	Target		
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		472,913,762	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasional kegiatan persandian	100%	365,319,863
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Luar Provinsi	3 Hari	107,593,899
						Tersedianya Pengadaan Kertas Fax	250 Roll	
Jumlah								28,213,752,216



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta difokuskan pada upaya menunjang pelaksanaan tugas pembangunan di bidang komunikasi dan informatika diarahkan kepada peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), sehingga tercipta aparatur yang mampu menangani masalah-masalah komunikasi dan informatika secara kompeten dan profesional, upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders*, sehingga akan terwujud program yang bersinergi, upaya peningkatan pelayanan publik yang berpengaruh terhadap pos-pos pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan peran kelembagaan/instansi untuk memperoleh dukungan anggaran agar program-program kerja dan kegiatan dapat terealisasi.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengacu pada visi Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta yakni **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan 5 Program 14 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023 melalui penetapan Visi Pembangunan : **"Mewujudkan Purwakarta Istimewa"**. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang ada dalam Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

Purwakarta, 15 Juli 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



Dra. HJ. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 19680628 199303 2 007